

## DAFTAR PUSTAKA

- Choiruddin, Zulkifli, Hadi Winarko, Rita Martini. 2019. Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk Pengamanan Barang Milik Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*. 3(1) : 1-10.
- Hasibuan, Siti Iramaya. 2018. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Penghapusan Gedung BAPPEDA dan Bina Graha di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*, Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Medan.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Barang Milik Daerah.
- Pangau, Melia Fransiska, dkk. 2019. Analisis Penatausahaan Aset Tetap Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus pada Pemerintah Prov. Sulawesi Utara). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 4(4).
- Ratnasari, Dwi. 2015. Manajemen Aset Daerah melalui Pengamanan Barang Milik Daerah pada Aset Tidak Bergerak di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. *Skripsi*, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Baarang Milik Daerah.*

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sumardi, Ikbar Andrian, dan Mustakim Muchlis. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *ASSETS*. 7(1) : 69-85.

*Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.*

*Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang 5 (Lima) Tahunan.*

*Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah.*

Yudistria, Yuyus. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Milik Daerah di Kota Bandung Berdasarkan Penerbitan Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal ISEI*. 1(1) : 39-44.

Yurisdia, Emi. 2019. Pengelolaan Mobil Dinas Sebagai Barang Milik Daerah Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 di Kabupaten Aceh Selatan. *Skripsi*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Darussalam, Banda Aceh.

INTENS NEWS. (2019, 9 September). Banyak Aset Pemkot Ternyata Belum Miliki Bukti Kepemilikan. Diakses pada 17 April 2020 (15:25 WIB) , dari <https://intens.news/banyak-aset-pemkot-ternyata-belum-miliki-bukti-kepemilikan/>

Klik Anggaran.com. (2019, 8 Maret). 258 Unit Kendaraan Dinas Senilai Rp 64 M di Kota Palembang Tak Bertuan?. Diakses pada 17 April 2020 (15:27WIB), dari <https://klikanggaran.com/peristiwa/peristiwa-daerah/258-unit-kendaraan-dinas-senilai-rp-64-m-di-kota-palembang-tak-bertuan.html>

<https://typoonline.com/kbbi/pengamanan>